

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Sejak tahun 1945 sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia mulai diberlakukan. Pada tahun 1945-1959 merujuk pada Budiardjo (2002:69) sistem parlementer mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamirkan. Ternyata sistem tersebut kurang cocok untuk Indonesia. Sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Budiardjo (2002:71) menjelaskan bahwa pada masa 1959-1965 Indonesia memakai sistem demokrasi terpimpin. Pada periode tersebut dominasi presiden, terbatasnya peranan partai politik, pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sangat mendominasi, proses demokrasi juga tidak dapat berjalan. Periode selanjutnya 1965, dijelaskan Budiardjo (2002:72) bahwa Indonesia memakai sistem demokrasi Pancasila hingga saat ini. Bentuk demokrasi Pancasila juga tidak dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Era saat ini banyak kepentingan publik yang tergeser oleh kepentingan partai politik.

Dilihat dari istilah katanya, merujuk pada Budiardjo (2002:50) kata demokrasi berarti “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people*. Dengan rakyat berkuasa, berarti rakyat memiliki hak untuk mengemukakan pendapat demi kepentingan rakyat. Bahwa rakyat berhak untuk

mengemukakan pendapat tersebut juga telah diakui dan dilindungi oleh negara dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3. Isi dari pasal 28E ayat 3 yakni setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Kebebasan berpendapat tersebut tidak lantas membuat masyarakat dapat secara langsung menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Adanya sistem demokrasi justru membatasi kebebasan masyarakat. Sistem demokrasi di Indonesia membuat adanya sistem keterwakilan masyarakat dalam pemerintahan. Keterwakilan dari aspirasi masyarakat diberikan pada posisi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan. Posisi keterwakilan masyarakat di DPR yang membuat ruang publik untuk menyampaikan pendapat menjadi terbatas.

Selain ruang publik yang semakin terbatas, pendapat masyarakat seringkali terbentur dengan kepentingan partai. Berikut berita yang diterbitkan oleh DPR melalui website DPR (DPR. 26 Maret 2015. Dpr.co.id) “Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengatakan konflik Fraksi/Parpol DPR RI dapat berdampak kepada kinerja DPR”. Dari berita tersebut terbukti bahwa kepentingan masyarakat seringkali terbentur oleh kepentingan partai politik di DPR.

Keterbatasan ruang publik tersebut membuat media memberikan tempat untuk aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Salah satu media yang memberikan tempat yakni media surat kabar memberikan ruang berupa rubrik opini bagi masyarakat yang akan memberikan yang pendapatnya dalam menyikapi kinerja pemerintah. Proses dalam media surat kabar tidak mudah untuk menyampaikan

pendapat, masyarakat harus menulis dan mengirim kepada surat kabar melalui pos, kemudian redaktur memilih surat yang layak untuk diterbitkan dan tentunya sebelum diterbitkan terlebih dahulu akan melalui editor. Sehingga tidak semua opini bisa dimuat, harus melalui editor terlebih dahulu. Dengan demikian proses dalam media cetak tidak mudah, tidak memiliki banyak tempat untuk berdiskusi dan memakan waktu cukup banyak.

Seturut perkembangan teknologi, saat ini kelemahan media cetak seakan dijawab oleh media *online*. Sama halnya dengan media cetak, media *online* juga memberikan tempat bagi masyarakat dalam menyalurkan pendapatnya melalui kolom pendapat di akhir berita. Kolom pendapat tersebut sebagai ruang publik yang tidak memiliki batas tempat, cepat tersampaikan dan tidak memakan waktu. Jumlah berita yang diterbitkan oleh media *online* juga tidak memiliki batas, sedangkan pada media cetak tidak semua berita dapat dimuat.

Cepatnya proses memberitakan pada media *online*, membuat informasi seperti membanjiri ruang virtual di internet. Hal tersebut terjadi karena media *online* tidak membatasi berita yang diterbitkan. Begitu juga dengan ruang bagi pendapat masyarakat yang tidak dibatasi. Semakin banyak berita, masyarakat akan semakin banyak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut Nicholas Gane dan David Beer dalam buku “Teori dan Riset Media Siber” (Nasrullah, 2014:14) media *online* memiliki proses komunikasi timbal balik dan media juga memfasilitasi dalam setiap berita ruang publik yakni kolom komentar, sehingga masyarakat dapat memberikan pendapatnya secara langsung dan bebas.

Melalui ruang publik yang ada di *new media* menciptakan budaya baru dalam proses demokrasi, yakni demokrasi deliberatif. Kehadiran model demokrasi deliberatif seperti angin segar bagi masyarakat Indonesia. Demokrasi deliberatif menjadi tempat yang cocok untuk menyampaikan pendapat melalui *new media*. Berdasarkan tulisan Hardiman (2009:128) istilah deliberatif dari asal katanya “deliberasi” berasal dari bahasa latin *deliberatio* yang berarti konsultasi, menimbang-nimbang atau dalam kosa kata politik yakni musyawarah. Beberapa teoretikus telah mengembangkan teori demokrasi deliberatif dan yang paling dikenal yaitu Habermas, selain Habermas terdapat beberapa teoretikus yakni Gutmann dan Thompson, kemudian James S. Fishkin. Beberapa teoretikus tersebut hanya mengembangkan teori dari Habermas. Menurut Fishkin dalam buku *When the People Speak : Deliberative Democracy and Public Consultation* (2009:33) untuk melihat demokrasi deliberatif dibutuhkan tiga hal yaitu kondisi deliberatif, kesetaraan publik, dan partisipasi.

Penyampaian pendapat masyarakat melalui *new media* diharapkan mampu menjawab konflik dalam pemerintahan daerah Jakarta, yakni kasus Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. Kronologi konflik antara Ahok dan DPRD bermula pada tanggal 27 Januari 2015 saat DPRD menggelar sidang paripurna bersama dengan DPRD DKI Jakarta untuk mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Terdapat perbedaan RAPBD sebesar Rp. 12,1 triliun. Kemudian pada tanggal 2 Februari 2015 Pemprov DKI mengajukan APBD 2015 ke Kemendagri, tetapi pada tanggal 6 Februari 2015 *draft* APBD yang dikembalikan dengan

alasan tidak lengkap. Ahok pun dibuat geram setelah Ahok menyadari adanya pihak DPRD yang mengajukan *draft* ke Kemendagri. Terlebih saat Ahok mengetahui anggaran yang diajukan oleh DPRD ke Mendagri Tjahjo tidak menggunakan sistem *e-budgeting*. Tujuan menggunakan *e-budgeting* agar tidak bisa di otak-atik, sedangkan DPRD tidak membuat dengan *e-budgeting* (Setiawan, Ruben dan Dwi Bowo. 27 Februari 2015. Suara.com).

Kemudian pada tanggal 13 Februari 2015 Ketua DPRD Prasetyo angkat bicara, pihak DPRD tidak suka disebut oleh Ahok bila memiliki oknum. Perselisihan tak kunjung reda hingga pada hari berikutnya Ahok melaporkan permasalahan ini kepada Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 23 Februari 2015, Mendagri Tjahjo Kumolo mengirimkan tim untuk membantu menyelaraskan APBD 2015. Tetapi, pada hari berikutnya Ahok justru memanaskan suasana dengan membeberkan cara DPRD menyelipkan “dana siluman” dalam APBD 2015 sebesar Rp. 12,1 triliun. DPRD dinilai memotong sejumlah anggaran dari program unggulan Pemprov sebesar 10-15% untuk dialihkan. Salah satu pengalihan dana untuk membeli *Uninterruptible Power Supply* (UPS) (Setiawan, Ruben dan Dwi Bowo. 27 Februari 2015. Suara.com).

Bertepatan dengan 100 hari Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 26 Februari 2015 dalam berita Kronologis konflik Ahok vs DPRD DKI Jakarta (Setiawan, Ruben dan Dwi Bowo. 27 Februari 2015. Suara.com) Ahok mendapatkan “hadiah”. Hadiah tersebut merupakan hak angket dari DPRD. Hak angket diberikan sebagai bentuk kekecewaan DPRD kepada Ahok karena Ahok memberikan kegagalan data dari pembelian *Uninterruptible Power Supply*

(UPS) di sekolah-sekolah pada tahun 2014 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .

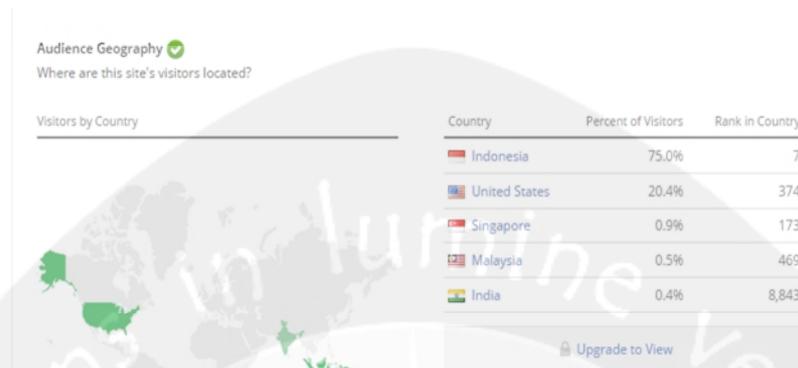
Peneliti memilih komentar konflik antara Ahok dengan DPRD DKI di media Kompas.com. Pemilihan Kompas.com tersebut berdasarkan data dari Alexa.com (Alexa. Juni 2015. Alexa.com) data menunjukkan media Kompas.com berada di peringkat 11 dan Detik.com di peringkat 7. Meskipun Kompas.com berada di peringkat 11, tetapi untuk jumlah persentase pengunjung yang mengakses dari Indonesia di dua situs berita tersebut lebih tinggi Kompas.com. Persentase untuk Kompas.com yakni sebesar 92,6% dan untuk Detik.com sebesar 75,0%. Presentase akses dari Indonesia menjadi hal yang penting karena isu yang dipilih oleh peneliti bersinggungan langsung dengan masyarakat yang tinggal di Indonesia.

Gambar 1.1
Persentase pembaca Kompas.com



Sumber: www.alexacom

Gambar 1.2
Persentase pembaca Detik.com



Sumber: www.alexa.com

Banyaknya pembaca yang melakukan akses dari Indonesia menunjukkan publik mempercayai Kompas.com sebagai media yang kredibel dan publik memiliki menunjukkan kedekatan dengan isu terkait Ahok. Selain Kompas.com dinilai kredibel dan memiliki peringkat pertama pengunjung portal berita, kedekatan terhadap isu oleh peneliti dari jumlah pendapat yang diberikan pembaca melalui kolom komentar. Terbukti dalam berita berjudul Ahok: Tunggu Gue jadi Presiden kalau Begitu Caranya (Aziza, Sari. 2015. Kompas.com) memiliki 177 komentar dari pembaca.

Salah satu pemilihan tema konflik Ahok dengan DPRD DKI karena media memberikan perhatian khusus terhadap Ahok. Peneliti melihat setiap harinya sejak tanggal 27 Januari 2015 hingga 13 April 2015 Kompas rata-rata menerbitkan 5-8 berita mengenai konflik ini. Untuk pemberitaan yang *general* mengenai Ahok rata-rata 8-10 berita setiap harinya. Sedangkan untuk media lain

seperti Detik.com memberitakan Ahok dengan rata-rata berita 5 berita untuk kasus APBD setiap harinya, sedangkan secara general rata-rata 5-8 berita. Bahkan pada bulan Maret, Kompas.com bisa memberitakan sebanyak 30 berita dalam satu hari. Penelitian ini hanya berfokus pada komentar pembaca terkait pemberitaan konflik antara Ahok dengan DPRD DKI mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu Ahok menarik untuk diliput media karena latar belakang Ahok yang berasal dari luar DKI, Tionghoa, non-muslim dan emosional. Selain hal tersebut menarik untuk diliput oleh media, perbedaan latar belakang tersebut menjadikan tantangan tersendiri bagi Ahok yang memimpin warga DKI. Menurut artikel berjudul “Karakteristik Kepimpinan BTP Ahok” (Simandjuntak, E. Fritz. 19 November 2015. Rmol.co) selain latar belakang Ahok yang berbeda, diungkapkan bahwa gaya kepemimpinan Ahok juga memiliki daya tarik bagi publik, sehingga media gencar memberitakan. Beberapa gaya kepemimpinan Ahok menurut Fritz dikenal sebagai pemimpin negara yang bersih. Ahok pernah meraih penghargaan Bung Hatta Award sebagai pejabat pemerintah yang terus menerus menciptakan iklim bersih korupsi di sektor pemerintahan. Selain Ahok sebagai pemimpin yang bersih, Ahok juga dinilai transparan karena anggaran yang dikeluarkan oleh Ahok dibuat agar terbuka. Dengan keterbukaan tersebut masyarakat bisa mengawasi penggunaan anggaran. Selain masalah dokumen, Ahok juga transparan membuka kesempatan masyarakat melihat langsung rapat kerja.

Peneliti meneliti interaksi komentar dalam pemberitaan konflik antara Ahok dengan DPRD DKI mulai tanggal 27 Januari 2015 hingga 13 April 2015. Dimulai dengan 27 Januari 2015 karena pada saat pertama kali RAPBD disahkan oleh DPRD melalui rapat paripurna. Sedangkan untuk pemilihan berakhir pada tanggal 13 April 2015, karena APBD sudah disahkan oleh Kemendagri dan disepakati oleh Pemprov DKI.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya mengenai demokrasi deliberatif oleh Andreas Ryan Sanjaya Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian tersebut, dilakukan pada tahun 2013 dengan objek pemberitaan polemik Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Ia meneliti dengan membandingkan ketiga media yaitu Detik.com, Kompas.com dan Viva.co.id. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan teori yang digunakan oleh Ryan yaitu aliran Habermas, sedangkan untuk penelitian ini menggunakan Fishkin. Selain itu unit analisis dalam penelitian ini lebih difokuskan pada demokrasi deliberatif menurut kondisi demokrasi deliberatif Fishkin. Penelitian ini hanya berfokus pada penelitian komentar di satu media sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan tiga media.

Kesimpulan dari penelitian tersebut, komentar-komentar pembaca dari ketiga media menunjukkan nilai demokrasi deliberatif yang rendah. Peneliti menuliskan (2013:105) “hasil penghitungan menunjukkan Detik.com mendapatkan indeks skor deliberasi paling tinggi dengan angka 1,97 disusul oleh Kompas.com dengan angka 1,42, lalu yang paling rendah diperoleh Vivanews dengan angka 1,35”.

B. Rumusan Masalah

Apakah komentar pembaca pada konflik antara Ahok dengan DPRD di Kompas.com merupakan bentuk interaksi demokrasi deliberasi?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui interaksi komentar dalam Kompas.com mengenai konflik antara Ahok dengan DPRD sebagai bentuk demokrasi deliberatif.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi Ilmu Komunikasi khususnya mengenai demokrasi deliberatif yang dikaitkan dengan komentar pembaca dalam berita.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi masyarakat mengenai proses demokrasi deliberatif yang dibangun melalui interaksi dalam kolom komentar.

E. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori berikut peneliti akan menjelaskan dari gagasan–gagasan Habermas serta S. Fishkin mengenai demokrasi deliberatif. Dilihat dari asal katanya, demokrasi deliberatif terdiri dari demokrasi dan deliberatif. Istilah demokrasi sebagaimana dikutip dari Budiardjo (2002:50) “*government or rule by the people*” atau rakyat berkuasa. Sedangkan istilah deliberasi dikutip dari Hardiman (2009:128) berasal dari kata *deliberatio* yang berarti konsultasi, menimbang-nimbang atau dalam bahasa politik yakni musyawarah. Dalam Jurnal

Nuswantoro (2015:57) berjudul *Politik Internet Indonesia: Ide Bebas Terhadap Perkembangan Politik, Ekonomi, dan Demokrasi*, pengertian demokrasi deliberatif menurut Hardiman dijelaskan lebih detail sebagai berikut:

Apa itu demokrasi deliberatif? Kata “deliberasi” dari kata latin *deliberatio* yang artinya “menimbang-nimbang” atau “musyawarah”. Demokrasi bersifat deliberatif jika proses pemberian alasan atas suatu kadidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat –dalam kosakata teoritis Habermas- “diskursus publik”. Demokrasi deliberatif ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam pembentukan aspirasi dan opini (*oefentlicher Meinungs und Willenbildungsprozess*) agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak yang memerintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah.

Demokrasi deliberatif dipopulerkan oleh Habermas, kemudian Gautmann dan Thompson, dan James S.Fishkin. Meskipun para teoretikus memiliki perbedaan dalam hal fokus kajian, pada dasarnya semua menggambarkan mengenai proses musyawarah melalui dialog dan tukar pengalaman di antara para pihak. Musyawarah sebagai metode yang ideal untuk mendapatkan keputusan. Dalam proses musyawarah untuk mencapai titik demokrasi deliberatif, Nuswantoro (2015:57) menekankan harus memiliki argumentasi, adanya dialog, saling menghormati pendapat satu dengan pendapat lainnya, serta berupaya untuk mencapai titik temu dan mufakat.

Hardiman (2009:130) memaparkan karakteristik demokrasi deliberatif dari Habermas. *Pertama*, Habermas juga mementingkan aturan-aturan main demokratis, jaminan hak-hak kebebasan, adanya partai-partai yang berkompetisi, pemilihan umum yang *fair*, asas mayoritas, debat publik dll. Menurut Habermas bila demokrasi deliberatif juga menekankan pentingnya dan arti normatif prosedur demokratis.

Kedua, Hardiman (2009:131) mencoba mengembangkan sebuah model demokrasi yang peka terhadap konteks, sebuah model yang memperhitungkan perubahan-perubahan yang telah terjadi di dalam masyarakat-masyarakat kompleks yang terglobalisasi dewasa ini. Akan tetapi demokrasi deliberatif yang dimaksudkan oleh Habermas bukanlah analisis- analisis atas kompleksitas masyarakat dewasa ini untuk membuktikan bahwa demokrasi dimungkinkan berkat perkembangan-perkembangan baru dalam bidang teknologi informasi. Habermas justru berupaya untuk menunjukkan bahwa demokratisasi tidak dapat ditanamkan dari luar ke dalam masyarakat kompleks. Demokratisasi berkembang dari dalam masyarakat-masyarakat itu sendiri dan didorong oleh sistem politik yang sudah ada.

Ketiga, model Hardiman (2009:132) juga beroperasi dengan ciri-ciri ideal deliberatif, seperti pentingnya bentuk argumentasi, inklusivitas para peserta, kebebasan dari paksaan, pencapaian konsensus dll. Tetapi, Habermas memusatkan diri pada pelaksanaan prosedur demokratis tidak hanya pada sistem politik yang terorganisir secara formal. Jika demokrasi berarti pemerintah oleh yang diperintah, pelaksanaan prosedur ini harus dapat dibentangkan sampai pada formasi pendapat secara tak terorganisir dan informal di dalam masyarakat. Oleh karena itu, Habermas menekankan apa yang disebut dengan proses demokrasi deliberasi jalur ganda yang terjadi pembagian kerja antara sistem politik dan ruang publik.

Pendapat Habermas mengenai demokrasi deliberatif atas kompleksitas masyarakat dewasa ini, menjadi salah satu pertimbangan bagi James S. Fishkin.

Pemikiran James S. Fishkin dalam buku *When the People Speak : Deliberative Democracy and Public Consultation* (2009:33) memaparkan: “*To explore the argument below we need working definitions of three democratic values: deliberation, political equality, and participation*”.

a. *Deliberation*

Dari ketiga hal pokok di atas, Fishkin (2009:34) menjelaskan syarat-syarat terjadinya deliberatif yaitu, *information, substantive balance, diversity, conscientiousness*, dan *equal consideration* yang lengkapnya :

a. *Information: The extent to which participants are given access to reasonably accurate information that they believe to be relevant to the issue*

b. *Substantive balance: The extent to which arguments offered by one side or from one perspective are answered by considerations offered by those who hold other perspectives*

c. *Diversity : The extent to which the major positions in the public are represented by participants in the discussion*

d. *Conscientiousness: The extent to which participants sincerely weigh the merits of the arguments*

e. *Equal consideration: The extent to which arguments offered by all participants are considered on the merits regardless of which participants offer them.*

Informasi yang hendak dicari oleh masyarakat adalah informasi yang sesuai dengan kebenarannya. Masyarakat cenderung mencari informasi yang lebih beragam, agar masyarakat memiliki pandangan saat hendak memberikan argumen. Informasi yang jelas dan relevan dengan konteks akan menjadi pertimbangan untuk berargumen.

Substantive balance atau keseimbangan substantif kondisi di mana setiap masyarakat mempertimbangkan isu. Pertimbangan tersebut menjadi dasar untuk membuat argumen saat hendak berpendapat. Dengan berbagai macam pertimbangan yang telah dipikirkan, maka masyarakat dapat menjadikan dasar untuk melakukan diskusi.

Diversity atau keragaman sudut pandang yaitu posisi masyarakat dalam melihat isu. Posisi tersebut dilihat dari partisipasi yang telah dilakukan. Beberapa pandangan tersebut akan mempengaruhi posisi dari masyarakat pada isu tertentu. Tentunya masyarakat memiliki posisi yang beraneka ragam terkait isu publik tersebut, selain itu warga juga sering kali mengaitkan satu isu dengan isu lainnya. Semakin banyak pandangan mengenai suatu isu dan posisi masyarakat terhadap isu tersebut, maka masyarakat semakin berkualitas dalam kondisi demokrasi deliberatifnya.

Conscientiousness menitikberatkan ketika masyarakat hendak terlibat dalam suatu proses diskusi mengenai isu tertentu, maka masyarakat harus menimbang-nimbang terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mau terlibat atau tidak dalam proses diskusi. Adanya diskusi memperlihatkan proses interaksi.

Equal consideration atau pertimbangan yang sama yaitu melihat bahwa argumen yang diberikan memiliki manfaat bagi masyarakat lainnya. Isi argumen yang bermanfaat bagi masyarakat mengandung keempat syarat sebelumnya. Untuk mencapai argumen yang bermanfaat, argumen tidak diberikan dengan menekan seluruh pihak. Agar hal tersebut tidak terjadi, maka masyarakat harus menghargai. Dengan sikap saling menghargai, maka pendapat satu akan ditanggapi pendapat lainnya.

Dari indikator terjadinya demokrasi deliberatif, kelima syarat di atas menentukan proses interaksi dalam demokrasi deliberatif. Untuk menyampaikan pendapat sebagai wujud partisipasi seseorang harus membuka identitas dirinya. Terdapat syarat lain sebagai pendukung ketika membicarakan proses demokrasi

deliberatif, yaitu nama pembaca. Di dalam proses demokrasi deliberatif keterbukaan identitas menjadi hal yang penting, tetapi keterbukaan identitas di media *online* memiliki kendala yaitu permasalahan anonimitas.

Wallace (2008:202) memaparkan: *Anonymity has sometimes been taken to mean “un-name-ability” or “namelessness.”* Terkadang menjadi anonim memberikan kesempatan kepada seseorang untuk merasa lebih nyaman saat hendak berkomunikasi, yaitu dengan cara menyembunyikan identitas diri. Tetapi dengan menyembunyikan identitas, membuat informasi yang disampaikan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Wallace (2008:217), seseorang yang menyatakan diri sebagai anonimitas memiliki berbagai tujuan, antara lain:

1. *Anonymity for the sake of furthering action by the anonymous person, or agent anonymity;*
2. *Anonymity for the sake of preventing or protecting the anonymous person from actions by others or recipient anonymity;*
3. *Anonymity for the sake of a process, of process anonymity.*

Tujuan pertama anonimitas yaitu untuk melanjutkan dan memperlancarkan pesan seseorang anonim. Tujuan kedua dari anonimitas untuk melindungi diri dari tindakan orang lain. Tujuan terakhir dari anonimitas digunakan untuk menjaga netralitas atau menjaga validitas dalam suatu proses yang akan dijalani.

b. *Political equality* atau Kesetaraan Politik

Kesetaraan politik dalam proses demokrasi deliberatif juga menjadi pertimbangan penting. Kesetaraan politik yang dimaksudkan oleh Fishkin (2009: 43) yakni masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi berimbang dari pemerintah.

c. *Participation*

Partisipasi selalu melibatkan sebagian besar populasi dalam sebuah partisipasi politik. Partisipasi politik yang dimaksudkan Fishkin (2009: 45) yaitu tingkah laku dari setiap anggota massa yang mengarahkan pada proses mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung, pembentukan, pengangkatan atau pelaksanaan dari kebijakan.

F. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan turunan dari kerangka teori yang bersifat unit analisis dan kategorisasi. Berikut unit analisis yang diturunkan dari teori demokrasi deliberatif James S. Fishkin, yakni mengenai syarat terjadinya deliberasi:

Tabel 1.1
Unit Analisis

Dimensi	Unit Analisis	Kategorisasi	Sub Kategorisasi
<i>Information</i>	Paham	Komentar dapat dipahami dengan jelas	Ya (1)
			Tidak (0)
	Terkait	Komentar yang diberikan berkaitan dengan isi berita	Ya (1)
			Tidak (0)
<i>Substantive Balance</i>	Argumen	Terdapat alasan dalam setiap komentar yang disampaikan	Ya (1)
			Tidak (0)
<i>Diversity</i>	Keragaman	Posisi pembaca yang menuliskan komentar secara tidak langsung (implisit) maupun secara langsung (eksplisit) dapat dilihat dalam komentar	Ya (1)
			Tidak (0)
<i>Conscientiousness</i>	Interaksi	Komentar yang diberikan	Menanggapi (1)

		menanggapi atau merespon komentar pembaca lainnya	Tidak menanggapi (0)
<i>Equal consideration</i>	Kesetaraan	Komentar yang diberikan mengganggu keberagaman di Indonesia	Ya(1)
			Tidak (0)
Kejelasan Data	Nama Pembaca	Nama pembaca yang memberikan komentar	Nama lazim digunakan sebagai nama orang (1)
			Nama tidak lazim digunakan sebagai nama orang (0)

G. Definisi Operasional

Pada bagian definisi operasional peneliti menjelaskan masing-masing bagian dari untuk analisis dan kategorisasi. Berdasarkan unit analisis dan kategorisasi yang telah dibuat, diharapkan mampu untuk dijadikan pedoman dalam melihat pembentukan proses demokrasi deliberasi. Proses demokrasi deliberatif tersebut dilihat dari interaksi komentar pembaca dalam menanggapi pemberitaan konflik antara Ahok dengan DPRD DKI.

Berikut penjelasan mengenai masing-masing dari unit analisis dan kategori yang digunakan dalam penelitian:

1. *Information*

Unit analisis paham dan terkait merupakan turunan dari syarat pertama terjadinya demokrasi deliberatif yaitu informasi. Saat pembaca memperoleh informasi yang beragam dan sesuai dengan kebenarannya, maka pembaca

memiliki pandangan yang beragam untuk menanggapi informasi tersebut. Pembaca akan menggunakan kolom komentar untuk menanggapi informasi tersebut dan pada saat menggunakan kolom komentar apakah informasi yang diberikan pembaca jelas dan dapat dipahami oleh pembaca lain/tidak.

Kategorisasi yang diturunkan dari unit analisis paham yaitu komentar dapat dipahami oleh pembaca lain secara mudah atau tidak. Selain paham unit analisis turunan dari *information* yakni terkait. Arti kata dari terkait yakni bersangkutan, informasi yang jelas dan dapat dipercaya jika pembaca memberikan informasi yang sesuai dengan topik. Pembaca saat menuliskan komentar, apakah komentar memiliki keterkaitan dengan berita. Apabila komentar tersebut dinilai tidak terkait dan tidak mudah untuk dipahami maka tidak memenuhi informasi sebagai salah satu syarat terjadinya demokrasi deliberatif. Sedangkan sebaliknya jika keduanya terjawab iya, maka syarat informasi dari demokrasi deliberatif terpenuhi.

2. *Substantive Balance*

Dimensi *substantive balance* merupakan syarat kedua terjadinya demokrasi deliberatif. Unit analisis yang diturunkan yakni argumen, argumen memiliki pengertian yakni alasan. Argumen menjadi penting karena setiap pandangan yang ada, pembaca harus memberikan argumen bukan sekedar pernyataan. Apakah setiap komentar yang diberikan terdapat alasan yang disampaikan, baik ketika komentar yang diberikan dirasa memihak atau tidak memihak. Jika seorang pembaca dalam komentarnya ditemukan sanggahan atau setuju dengan

memberikan argumen maka akan memenuhi unsur *substantive balance* sebagai syarat kedua demokrasi deliberatif.

3. *Diversity*

Turunan dari syarat demokrasi ketiga *diversity* dengan unit analisis keragaman. Arti dari keberagaman yakni perihal beragam-agam atau jenis. Sudut pandang terhadap persoalan membuat komentar yang dituliskan semakin beragam karena masyarakat melihat lebih satu persoalan terhadap obyek yang sama. Dengan banyaknya sudut pandang, posisi pembaca juga terlihat dari komentar yang diberikan. Keberagaman komentar tersebut apakah memperlihatkan pembaca menyatakan posisinya sebelum memberikan komentar atau argumen.

Posisi pembaca dinyatakan baik secara eksplisit maupun implisit, posisi yang memihak satu subjek ataupun tidak memihak. Sebagai contoh secara eksplisit pembaca menuliskan “saya setuju dengan sikap DPRD menjatuhkan Ahok atau saya bukan warga DKI, tetapi kasus ini sangat memalukan sebaiknya DPRD dan Ahok segera mediasi”. Jika menyatakan posisinya baik secara eksplisit maupun secara implisit maka dikatakan memenuhi unsur *diversity* sebagai syarat keempat kondisi demokrasi deliberatif. Tetapi, jika tidak menyatakan posisinya hanya berpendapat saja maka tidak bisa memenuhi syarat keempat kondisi demokrasi deliberatif.

4. *Conscientiousness*

Berkaitan dengan syarat keempat dari demokrasi deliberatif yaitu *conscientiousness*, memiliki unit analisis interaksi. Maksud dari interaksi yakni hal yang saling berhubungan. Interaksi yang dimaksudkan ketika pembaca akan

terlibat dalam diskusi, apakah komentar yang diberikan menanggapi atau tidak menanggapi komentar sebelumnya. Jika pembaca menginginkan terjadi interaksi maka dengan cara menanggapi komentar sebelumnya.

Menanggapi komentar sebelumnya perlu dijabarkan lagi bahwa menanggapi komentar sebelumnya dapat dalam bentuk dukungan, penolakan atau pertanyaan. Jika pembaca menanggapi isu maka sudah memenuhi unsur *conscientiousness* sebagai syarat keempat demokrasi deliberatif. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak ingin berdiskusi maka tidak terjadi proses interaksi. Dengan demikian tidak ada interaksi maka unsur keempat demokrasi deliberatif tidak terpenuhi dan mendapatkan nilai nol.

5. *Equal consideration*

Equal consideration sebagai turunan dari syarat demokrasi deliberatif Fishkin yang terakhir. Unit analisis dimensi *equal consideration* yaitu kesetaraan. Pengertian kesetaraan yakni kesejajaran. Dengan komentar yang memiliki pandangan yang sejajar pada sesama pembaca maupun subjek dalam berita, maka memungkinkan isi di komentar memiliki manfaat bagi orang lain karena tidak menjelek-jelekan keberagaman. Jika komentar yang diberikan justru menjelek-jelekan, maka isi komentar tersebut tidak akan memiliki manfaat positif bagi orang lain.

Kategorisasi dari kesetaraan yakni semua orang baik subjek dalam berita ataupun komentator lain dipandang sama, tidak ada perbedaan dari keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia sangatlah luas, mulai dari ekonomi, pendidikan, ras, suku, agama, keberpihakan partai dll. Sub

kategorisasi dari unit analisis kesetaraan yaitu apabila terdapat kalimat yang mengganggu keberagaman maka bukanlah wujud dari demokrasi deliberatif. Justru sebaliknya, jika keberagaman yang ada dihargai maka menjadi wujud demokrasi deliberatif. Contoh beberapa kalimat yang menyatakan mengganggu keberagaman yaitu “mentang-mentang Cina”, “orang ga asli betawi aja...”, “tidak beragama muslim”, dll. Dengan demikian syarat kelima demokrasi deliberatif terpenuhi jika ada bentuk penghargaan terhadap keberagaman.

Kelima syarat demokrasi deliberatif tersebut sebagai proses demokrasi dalam pengambilan keputusan sudah dapat diambil dengan matang. Namun, sejalan dengan syarat pertama bahwa keakuratan informasi harus didapatkan dari sumber yang jelas. Dalam bentuk demokrasi deliberatif syarat keterbukaan identitas oleh peneliti dimasukkan dalam syarat demokrasi deliberatif dan dijadikan sebagai syarat keenam demokrasi deiberatif. Dengan demikian nama pembaca dalam menuliskan komentar dapat dilihat apakah nama lazim digunakan sebagai nama orang atau tidak. Lazim memiliki pengertian lainnya yakni sudah biasa. Sehingga ketika nama pembaca lazim digunakan dapat diduga bahwa pembaca ingin membuka dirinya dalam proses demokrasi. Jika nama yang digunakan tidak lazim sebagai nama orang maka dapat diduga seseorang pembaca tidak dapat menunjukkan proses demokrasi karena menutupi data dirinya atau menyatakan dirinya sebagai anonim.

Jika dilihat dari syarat demokrasi deliberatif apabila keenam syarat demokrasi deliberatif tersebut terjawab dan sesuai dengan syarat demokrasi deliberatif, maka sudah berlangsung proses demokrasi deliberatif di Indonesia. Tetapi jika tidak

semua terpenuhi maka di Indonesia kondisi proses demokrasi deliberatif hanya terpenuhi dari beberapa aspek syarat demokrasi deliberatif.

H. Metodologi penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode analisis isi. Idrus (2009:21) menjelaskan penelitian kuantitatif menyisihkan dan menentukan kategori-kategori variabel, kemudian variabel yang diperoleh menjadi sarana atau alat untuk menganalisis. Dengan kata lain, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menggambarkan masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Pada penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan dengan tujuan untuk memetakan objek penelitian. Objek penelitian yaitu komentar pembaca Kompas.com terkait konflik antara Ahok dengan DPRD periode 27 Januari–13 April 2015.

b. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi deskriptif. Menurut Berelson dalam buku Nasrullah (2014:184), analisis isi merupakan teknik dalam riset yang digunakan untuk menguraikan isi komunikasi yang jelas secara objektif, sistematis dan kuantitatif. Dari definisi tersebut Nasrullah (2014:184), menguraikan maksud Berelson melalui beberapa asumsi dasar: *Pertama*, asumsi analisis isi yang melihat adanya hubungan antara konten dan maksud atau tujuan dari isi, dan bisa juga melihat hubungan antara konten dan efek yang muncul. Hal tersebut sebagai interpretasi yang dalam prakteknya teknik analisis isi digunakan untuk melihat maksud/motif.

Kedua Nasrullah (2014:184) menjelaskan konten analisis mengasumsikan bahwa teknik ini digunakan untuk menguraikan makna. Pada umumnya konten harus diposisikan sebagai “*common meeting-ground*” atau adanya kesamaan makna antara komunikator, khalayak, maupun peneliti.

Ketiga, teknik analisis memfokuskan pada deskripsi kuantitatif. Nasrullah (2014:185) menjelaskan suatu makna dari konten yang dibuat dapat terlihat dari frekuensi kemunculan karakteristik dari konten itu sendiri. Teknik analisis isi memerlukan perhitungan terhadap konten secara kuantitatif. Perhitungan konten ini merupakan karakteristik dari analisis isi, di mana prosedur dari teknik ini yaitu perlunya jumlah konten atau disebut dengan *numerical values* seperti sering, terkadang, bertambah atau dengan angka dan persen.

Dalam penelitian konflik antara Ahok dengan DPRD DKI di Kompas.com, metode analisis isi deskriptif digunakan untuk membantu menginterpretasikan hasil yang diperoleh secara kuantitatif. Hasil kuantitatif diperoleh peneliti melalui *coding sheet* yang dibagikan kepada *coder*.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data riset dokumentasi. Menurut Bungin (2005:154) metode dokumenter merupakan salah satu metode yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Untuk mendapatkan data tersebut peneliti menggunakan data riset dokumentasi sebagai data primer. Pengertian data primer menurut Bungin (2005:132) yakni data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu komentar pembaca Kompas.com dalam pemberitaan

konflik antara Ahok dengan DPRD DKI periode 27 Januari 2015-13 April 2015. Sedangkan peneliti juga menggunakan data sekunder, pengertian data sekunder yakni data yang digunakan untuk menunjang teori. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku dan jurnal yang menunjang penelitian.

d. Teknik Sampling

Merujuk Effendi dan Singarimbun (1982:108) pengertian populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya dapat diduga. Jumlah keseluruhan populasi 36.957 komentar diperoleh dari 1.153 berita. Peneliti tidak menampilkan keseluruhan data populasi, karena jumlah yang terlalu banyak. Sebagai contoh peneliti menampilkan 10% dari berita dengan jumlah 115 berita yaitu:

Tabel 1.2
Populasi Komentar

Judul Berita	Banyaknya Komentar Pembaca
27 Januari 2015	
Pandangan Ahok Soal 13 Catatan yang Diberikan DPRD	0
Strategi Ahok Setelah Usulan Pembangunan LRT Dicoret DPRD	2
APBD Rp 73 Triliun Disahkan Apa Prioritas Ahok di 2015	2
APBD 2015 Disahkan DPRD Punya 13 Catatan pada DKI	1
Sempat terlambat Akhirnya APBD DKI 2015 Disahkan	0
28 Januari 2015	
Ahok: Sudah Dapat Gaji, "Lo" Enggak Bisa Curi APBD lagi	7
30 Januari 2015	
Anggaran KJP 2015 Meningkatkan Rp. 3 triliun Apa Alasannya	0
Tahun 2015 Pemprov DKI Anggarkan Rp. 19 Triliun untuk Gaji PNS	3
Pantaskah Lurah di DKI Digaji Rp. 33 Juta ?	31
Daftar Gaji PNS DKI yang Nilainya Tinggi	21
31 Januari 2015	
Gaji Besar Malah Membuat Resah Sebagian	32

PNS DKI Jakarta	
06 Februari 2014	
Kemendagri Sebut Draft APBD DKI Berantakan	4
Anggota DPRD Belum Gajian Klaim Pinjaman Uang Sana-sini	0
8 Februari 2015	
APBD Berantakan Ahok Bakal Tak Terima Gaji Enam Bulan	22
Sudah Disahkan, APBD DKI Baru Dapat Digunakan Maret	0
9 Februari 2015	
DPRD Sebut Pemprov DKI Coba Sogok Rp. 12 Triliun	26
10 Februari 2015	
DPRD Tuding DKI Sogok Rp. 12 Triliun, Ahok Merasa Difitnah	84
11 Februari 2015	
Ahok: Anggaran Nenek Lu Rp. 8.8 Triliun!	85
12 Februari 2015	
APBD Tersandera Perbedaan Versi	0
13 Februari 2015	
Ketua DPRD Kecewa Ahok Kurang Komunikasi dengan Legislatif	14
Lulung Mengaku Tak Akan Ikut Makzulkan Ahok asal....	16
Kecewa Pengajuan APBD 2015, Ketua DPRD Merasa Ditipu Ahok	25
M.Taufik Akan Gelar Rapim Bicarakan Pemakzulan Ahok	45
Ahok Sudah Tolak, Djarot Kembali Hidupkan Wacana "Deep Tunnel"	1
14 Februari 2015	
Ahok Adukan Ulah DPRD DKI kepada Jokowi	39
Ahok Sambut Ancaman Pemakzulan Dirinya oleh Taufik	48
16 Februari 2015	
Pemprov DKI Telah Kirimkan APBD yang Sudah Diperbaiki ke Kemendagri	0
Basuki Tegaskan Penyusunan APBD DKI Tetap Gunakan e-Budgeting	6
DPRD Keberatan Dianggap Penghambat APBD 2015	12
DPRD DKI Gubernur Memang Tak Pernah Merasa Salah	7
Fraksi PDIP DKI Tak Ada Niat Makzulkan Ahok	19
DPRD DKI Tuding Ahok Sengaja Lakukan Pelanggaran	9
DPRD DKI Akan Bentuk Tim Hak Angket	1
17 Februari 2015	
Ahok Ayo Dong Anggota DPRD Interpelasi Saya Kenapa Jadi Takut	90
Kisruh DKI dan DPRD Ahok Jamin Program	1

Unggulan Jakarta Tak Terhambat	
Ahok Sayangkan DPRD Cuma Gunakan Hak Angket	41
20 Februari 2015	
DPRD DKI Tegaskan Belum Ada Kesepakatan dengan Ahok soal APBD	5
Kemendagri Pemprov dan DPRD Harus Semakan Persepsi soal APBD	6
23 Februari 2015	
Keterlambatan APBD Hambat Pembangunan Sekolah	0
APBD DKI 2015 Belum Beres, PNS Belum Dapat TKD	0
Pemprov DKI Minta DPRD Maksimalkan Perannya dalam Pembuatan APBD	0
Kebijakannya Akan Diselidiki DPRD, Ini Kata Ahok	4
Soal APBD pemprov DKI Klaim Sudah Dapat Persetujuan DPRD	4
Soal APBD Pemprov DKI Masih Harus Tunggu Keputusan Mendagri	0
Taufik Yakin Temui Kesalahan Fatal Ahok	147
24 Februari 2015	
Ahok Bongkar Siasat DPRD Selipkan Anggaran Siluman	123
Kisruh APBD, Antisipasi Banjir Jakarta Pakai Anggaran Ini	0
Ahok: Orang Jakarta Kaya-Kaya Bukan Penuntut	2
Ahok: 100 Persen Anggota DPRD Ajukan Hak Angket juga Tak Apa-Apa	18
Wagub: Hak Angket Haknya Dewan, tetapi Tolong Pikirkan Rakyat	4
Ketua DPRD DKI: Sudah 90 Persen Anggota Tanda Tangan Hak Angket	13
Ahok Tanggapi Tudingan APBD Tak Kunjung Cair Akibat Gaji Fantastis PNS DKI	5
APBD DKI Molor, PNS Andalkan Utang untuk Tutup Kebutuhan	1
Sekolah Terusik APBD	0
Fitra Tuding APBD DKI Dikembalikan karena Gaji PNS DKI Terlalu Besar	7
25 Februari 2015	
Bantah Anggaran Siluman Rp. 12,1 Triliun, Taufik Sebut Ahok Panik	53
Ini. Usulan Anggaran Siluman DPRD DKI ke Dinas Pendidikan yang Diungkap Ahok	98
Besok Rapat Paripurna Pengajuan Hak Angket oleh DPRD DKI	9
Ahok Bongkar Ajuan Anggaran Siluman DPRD di Dinas Pendidikan	16
Ahok Akan Adukan Soal Anggaran Siluman Rp. 2,1 Triliun kepada Kemendagri	4

Taufik Jadi DPRD Pertama yang Tandatangani Spanduk Cabut Mandat Ahok	53
Ahok: Saya atau Anggota DPRD DKI Masuk Penjara	142
Ahok: Saya Enggak Bisa Jaga Etika yang Mana	22
Ahok: Pak Prasetyo Itu Terlalu Baik	8
Kepala Bappeda Akui Pembangunan Jakarta Terhambat Masalah APBD	0
Ahok Anggap Saru Perseteruan dengan DPRD DKI	3
Ahok Laporkan Anggota DPRD ke Kejagung	14
Cerita Ketua DPRD DKI yang Sakit karena Menjaga Ahok	45
26 Februari 2015	
Ahok Siapkan Laporan Mark Up Pengadaan UPS di Sekolah Tahun 2014	32
Ahok Gaji Rp. 33 Juta untuk Lurah Belum Tentu Tercapai	2
Lulung: DPRD Tak Alergi dengan e-bugeting, tetapi Bukan Produk Hukum	34
Ahok: Beberapa Anggota DPRD Terpaksa Tandatangani Angket	16
Ahok: Saya Tidak Ikhlas APBD DKI Dimainkan Seperti Ini	29
Penggunaan Hak Angket bagi Basuki	4
Fraksi PKB Belum Satu Suara Soal Hak Angket untuk Ahok	4
Lagi-lagi, Taufik Jadi Anggota DPRD Pertama Tanda tangani Hak Angket	30
Ahok Dianggap Langgar 11 Peraturan Perundang-undangan	28
Sebenarnya PKB Mengaku Hanya Ingin Interpelasi Ahok	13
Ketua DPRD Persilahkan Ahok Melaporkan ke Penegak Hukum	12
Ahok: Biar Masyarakat Menilai Mana yang Lebih Pantas	23
Fraksi PKB Jelaskan Perubahan Sikap soal Hak Angket untuk Ahok	4
Ketua DPRD Tak Senang Disebut Penipu oleh Ahok	27
Ini Pandangan Tiap Fraksi dalam Sidang Pengajuan	7
Djarot: Tidak Boleh Ada yang Adu Domba Saya dengan Ahok	1
Buka Draf APBD, Hindari Titipan	2
Djarot Siap Hadapi DPRD DKI Jakarta	10
Ketua DPRD: Saya Tidak Suka Etika Ahok	26
DPRD DKI Kompak Setuju Hak Angket untuk Ahok	51
Wagub Perintahkan SKPD Tak Hanya Tunggu Anggaran	0
Ahok Disebut Tak Punya Sopan Santun, Anggota DPRD Bersorak	55

DPRD Paripurna Angket, Ahok Pimpin Rapat Pembebasan Tanah	2
Anggota DPRD Tanda Tagani Usulan Hak Angket untuk Ahok	6
Ketua DPRD: Hak Angket Bukan untuk Memakzulkan Ahok	15
Ahok Temui Semua Ketum Partai untuk Batalkan Hak Angket	28
Dunia Pendidikan dalam 100 Hari Ahok-Djarot	11
Caci Maki bagi Ahok dari Luar Pagar DPRD DKI	33
Ahok Mengaku Kecolongan Rp. 330 Miliar di APBD DKI	7
Mana Janji Djarot Mediasi Ahok dengan DPRD	29
Tak Tanda Tangani Spanduk, Cabut Mandat Ahok PKB Disebut "Masuk Angin"	12
Semua Anggota Fraksi PDIP Kompak Usung Angket untuk Ahok	30
Mau Sampai Kapan Ahok dan DPRD DKI Bertengkar ?	46
Ahok Senang 100 Hari Kerjanya Dapat Hadiah Hak Angket dari DPRD	3
Ahok: Mereka yang Korupsi, Gue Mau Bikin Miskin	64
SKPD DKI Diminta Bereskan 6.096 Laporan Keuangan Janggal Temuan BPK	2
Ahok Harus Buka Lebih Banyak Lagi Anggaran Siluman DPRD DKI	27
Hadiah 100 Hari Gubernur Ahok	18
Ahok: Anggaran Siluman DPRD Ada di Semua SKPD	22
Ahok Tidak Akan Ribut, jika Saya Terima Usulan Rp. 12,1 Triliun	11
27 Februari 2015	
Ahok Bantah Pelaporannya ke KPK Terkait Hak Angket DPRD	7
Ahok Ancam Balik Panitia Hak Angket DPRD DKI	26
Ahok Laporkan Dugaan Korupsi di DKI dari 2012-2015	15
KPK Telaah Laporan Ahok	13
Ahok ke KPK, Pimpinan DPRD Tidak Takut	25
Ahok Bertahan Saja	18
Pembelaan Diri DPRD soal Tudingan Anggran Siluman	16

Sumber: diolah dari indeks berita www.kompas.com

Untuk pengambilan sampel peneliti menggunakan jenis sampel probabilitas.

Penggunaan jenis sampel ini berkaitan dengan penelitian yang bertujuan untuk

mengeneralisasi, maka dari itu setiap populasi memiliki peluang yang sama. Dikutip dari Bungin (2005:115), sampel dihitung menggunakan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel yang dicari

N: Jumlah populasi

d^2 : nilai presisi (90% atau $d=0,1$)

$$n = \frac{36957}{36957 \times 0.1^2 + 1}$$

$$= 100$$

Dari perhitungan dengan jumlah populasi 36.899 komentar sampel diketahui sebanyak 100 komentar. Untuk mendapatkan 100 sampel komentar digunakan metode *simple random sampling*. Pengertian dari *simple random sampling* menurut Sugiarto (2003:46) adalah metode yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama besar untuk diambil sebagai sampel. Terdapat beberapa cara sebagai berikut untuk mendapatkan 100 sampel komentar, antara lain:

1. Judul berita yang sudah dimasukkan dalam kolom-kolom dicetak dalam kertas sebanyak 100 lembar (tidak boleh lebih, atau kurang), kemudian dari 100 lembar tersebut diambil 10 lembar dengan cara membuat nomor dari 100 kertas

tersebut. Kemudian untuk mendapatkan 10 lembar kolom berita tersebut akan dilakukan pengundian.

2. Apabila dari 10 lembar tersebut sudah mencukupi, maka tidak akan dilakukan pengambilan kertas kembali. Jika jumlahnya lebih, maka setiap judul berita dalam kolom diberi nomor dan diacak kembali.
3. Setelah mendapatkan 100 judul berita. Langkah selanjutnya adalah memilih satu komentar dari setiap judul berita, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) komentar yang diberikan harus berupa kalimat minimal 1 kalimat
 - b) komentar bisa berdiri sendiri, ataupun komentar yang berinteraksi dengan komentar lain.

Dengan cara *simple random sampling* tersebut maka semua sampel memiliki kesempatan yang sama dan diperoleh sampel sesuai dengan rumus Slovin yakni 100 komentar.

e. Teknik analisis data

Peneliti mendeskripsikan bagaimana proses demokrasi deliberatif dalam komentar pembaca pemberitaan konflik antara Ahok dengan DPRD DKI di Kompas.com. Peneliti melakukan uji reliabilitas agar hasil yang diperoleh menjadi objektif dan reliabel. Semakin banyak persamaan dari hasil pengkodean, maka semakin reliabel untuk kategori yang sedang diteliti. Peran peneliti yakni sebagai *coder* pertama (C1), sedangkan *coder* (C2) rekan alumni Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UAJY, Ryan Sanjaya. Selain itu peneliti juga meminta bantuan dari Guru PKN sekaligus penulis aktif surat pembaca, Probo Djati El, sebagai *coder* (C3). Pemilihan *coder* Ryan karena pengalaman Ryan

telah meneliti komentar pembaca sebelumnya dan untuk pemilihan *coder* tiga Probo karena selain probo aktif menuliskan opini di surat kabar Probo juga terbilang aktif menyebarkan pendapatnya di media *online* melalui Kompas.com. Masing-masing hasil pengukuran C2 dan C3 akan dibandingkan dengan hasil pengukuran peneliti dengan menggunakan rumus Holsti.

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

Keterangan :

- CR : *Coefficient Reliability*
M : Jumlah *coding* yang disetujui kedua *coder*
N1 : Jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder* 1
N2 : Jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder*

Dengan rumus Holsti, peneliti mengetahui derajat kesamaan antara peneliti dan dua pengkode. Jika hasil uji reliabilitas semakin tinggi, maka semakin reliabilitas kategori yang telah disusun. Derajat kesamaan dinilai memenuhi syarat jika hasil yang diperoleh di atas 0,7 atau 70%.

Setelah dilakukan penilaian dan menghitungnya untuk setiap komentar, dengan asumsi semakin tinggi skor yang diperoleh untuk masing-masing unit analisis maka ada interaksi demokrasi deliberatifnya di Indonesia. Analisis dari data tersebut digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh, kemudian hasilnya dijabarkan secara deskriptif.